

# **DAFTAR PEGAWAI BRMP KEPULAUAN RIAU YANG TELAH MELAPORKAN LHKPN TAHUN 2024**

No	Nama/NIP	Pangkat	Status	Jabatan	Jenis Lapor	Status	Ket
1.	Ahmad Tohir Harahap, S.P.M.Si NIP.197911212011011007	PenataTk.I/III.d	PNS	Kepala Balai/KPA	LHKPN	Sudah	Sudah Terverifikasi Lengkap Sudah diumumkan KPK
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P. NIP. 198204032011011011	PenataTk.I/III.d	PNS	Kepala Subbagian Tata Usaha/PPK	LHKPN	Sudah	Sudah Terverifikasi Lengkap Sudah diumumkan KPK
3.	Raden Catur Prasetyono, S.P., S.ST. NIP. 196612311994031011	Penata Tk.I /IIId	PNS	PPSPM	LHKPN	Sudah	Sudah Terverifikasi Lengkap Sudah diumumkan KPK
4.	Fajar Vadholla, S.E. NIP. 198908252019021001	Penata Muda Tk. I/III.b	PNS	Penelaah Teknis Kebijakan/Benda hara Penerimaan	LHKPN	Sudah	Sudah Terverifikasi Lengkap Sudah diumumkan KPK
5.	Agusrizal, S.ST NIP. 198608182015031001	Penata Muda/III.a	PNS	Penelaah Teknis Kebijakan/Bendahara Pengeluaran	LHKPN	Sudah	Sudah Terverifikasi Lengkap Sudah diumumkan KPK
6.	Zul Arsal NIP.198908012015031003	Pengatur Muda/II.b	PNS	Pengadministrasi Perkantoran/ Pejabat Pengadaan	LHKPN	Sudah	Sudah Terverifikasi Lengkap Sudah diumumkan KPK

Tanjungpinang, 16 Mei 2025

Kepala Balai



Ahmad Tohir Harahap, S.P., M.Si  
NIP.197911212011011007

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN****UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AHMAD TOHIR HARAHAP**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **998848**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 315.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/144 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 232.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 31.500.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 29.631.387****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 608.131.387****III. HUTANG** **Rp. 175.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 433.131.387****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAHRUL HADI NASUTION
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 184239

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>401.960.000</b>
1. Tanah Seluas 283 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 299.960.000		
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.500.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>55.650.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.720.774</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>471.830.774</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>78.766.656</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>393.064.118</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RADEN CATUR PRASETIYONO  
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
3. NHK : 934969

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.832.257
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.832.257

**III. HUTANG** Rp. 178.400.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. -173.567.743

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FAJAR VADHOLLA  
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA  
3. NHK : 840711

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>290.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , LAINNYA Rp. 290.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.600.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.244.417</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>309.844.417</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>292.844.417</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUSRIZAL
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 934937

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.500.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.828.715</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>158.828.715</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>293.589.869</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>-134.761.154</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZUL ARSAL
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 893785

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	16.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT DELUXE Tahun 2022, HASIL SENDIRI		
Rp. 16.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	8.450.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	9.855.862
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	34.305.862
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	66.407.388
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-32.101.526

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.